

Keterkaitan Belanja Pemerintah terhadap PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara

The Relation of Government Expenditures to GRDP Per Capita District/City in Southeast Sulawesi

La Ode Muhammad Tamzil Syuhada^{1*}, Wiwiek Rindayati², & Bambang Juanda²

¹Magister Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia*; ²Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia; *Penulis korespondensi.
e-mail: tamzil_syuhada@apps.ipb.ac.id
(Diterima: 15 April 2022; Disetujui: 18 April 2023)

ABSTRACT

*The issuance of Law No. 1 of 2022 as a complement to Law No. 23 of 2004 concerning financial relations between the central and regional governments. Fiscal transfer policies are becoming more selective in seeing local needs. However, this needs to be supported by good fiscal management in the regions to carry out development activities that have an impact on increasing income that is more evenly distributed between regions and communities. One of the important instruments of fiscal decentralization is the management of government spending. Therefore, the purpose of this study is to examine the relationship between government spending and per capita income in Southeast Sulawesi. The units of observation analyzed are gross regional domestic product per capita in the previous year, personnel expenditures, goods and services expenditures, capital expenditures, HDI, district and city dummy variables. The model approach in the calculation is panel data regression analysis from 2016-2020. Based on the test results, the probability (*F*-statistics) is obtained, the equation of income per capita the Hausman test > 0.05 , then the random effect model (REM) equation is the best model choice. The results of the analysis show all independent variables have a strong relationship with the dependent variable in the model which is shown by an *R*-square of 0.982. Variables that show significant effect on the increase in per capita income are ($GRDPprk_{(t-1)}$), goods and services expenditure, capital expenditure and HDI, while personnel expenditure has a negative effect on per capita income for both districts and cities in Southeast Sulawesi Province.*

Keyword: government expenditures, per capita income, panel data regression

ABSTRAK

Lahirnya UU No 1 tahun 2022 sebagai pelengkap dari UU No 23 tahun 2004 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan transfer fiskal menjadi lebih selektif dalam melihat kebutuhan di daerah. Namun hal itu perlu didukung dengan pengelolaan fiskal yang baik di daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan yang berdampak pada peningkatan pendapatan yang lebih merata antara daerah maupun antar masyarakat. Salah satu instrumen penting dari desentralisasi fiskal adalah dari sisi pengelolaan belanja pemerintah. Olehnya itu, tujuan dari penelitian ini adalah menguji keterkaitan belanja pemerintah terhadap pendapatan per kapita di Sulawesi Tenggara. Unit amatan yang dianalisis adalah produk domestik regional bruto per kapita tahun sebelumnya, belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, IPM, serta variabel *dummy*

kabupaten dan kota. Pendekatan model dalam perhitungan adalah analisis regresi data panel mulai tahun 2016-2020. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan Probabilitas (F-statistik), persamaan pendapatan perkapita pada uji hausman > 0.05 , maka persamaan *random effect model* (REM) adalah pilihan model terbaik. Hasil analisis menunjukkan semua variabel independen memiliki keterkaitan yang kuat terhadap variabel dependen dalam model yang diperlihatkan dengan R-square sebesar 0.982. Variabel yang menunjukkan pengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan perkapita adalah (PDRBprk_(t-1)), belanja barang dan jasa, belanja modal serta IPM, sementara belanja pegawai berpengaruh negatif terhadap pendapatan perkapita baik kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kata Kunci: belanja pemerintah, pendapatan per kapita, regresi data panel

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal merupakan perwujudan keuangan publik dalam menciptakan efisiensi sumber daya, keseimbangan fiskal secara horizontal, redistribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi (Musgrave, 1959). Banyak negara terutama di negara berkembang yang menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal dalam mempercepat pembangunannya dengan memperbaiki efisiensi di sektor publik yang berdampak pada kompetensi antar daerah. (Wallich & Bird, 1993; Oates, 1993). Pemberian kewenangan fiskal sepenuhnya kepada daerah lebih mencerminkan daerah sebagai subjek pembangunan. Hal ini dianggap penting karena daerah lebih mengetahui berbagai aspek pembangunan yang merupakan kebutuhan masyarakatnya. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah serta mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal (Juanda, 2016).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 sebagai pelengkap dari Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Perubahan didasari karena perjalanan desentralisasi fiskal sepenuhnya belum tercapai di beberapa daerah. Kebijakan transfer fiskal menjadi lebih selektif dalam melihat kebutuhan di daerah. Formula Perhitungan dilakukan lebih mencerminkan kebutuhan masing-masing daerah berdasarkan keberagaman, karakteristik, potensi daerah dan kapasitas kemampuan keuangan suatu daerah. Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan

dan peningkatan indeks pembangunan manusia yang merupakan faktor penunjang kinerja pembangunan. Menurut Otsuka *et al.* (2012) dalam menjaga kesenjangan antar negara bagian di India tidak semakin melebar, maka diperlukan peningkatan sumber daya manusia melalui desentralisasi belanja kesehatan dan pendidikan secara efektif.

Pelaksanaan pembangunan di daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan dana transfer. Dana transfer meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hasil kajian Limoeiro (2015) mengungkapkan bahwa kebijakan pendapatan seperti dana transfer kepada daerah terutama daerah dengan status miskin atau tertinggal memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan output lokal.

Kebijakan alokasi DAU dan DAK sebagai instrumen fiskal bertujuan sebagai efisiensi pada sektor publik guna meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berdampak pada menurunnya ketimpangan pembangunan antar daerah (Wardhana *et al.*, 2013). DAU memiliki fungsi distribusi yang dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan masing-masing daerah serta disesuaikan dengan urgensi ataupun kebutuhan dari daerah masing-masing. Pemberian DAU yang lebih besar, Sebagai wujud pemerataan pembangunan antar daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah dapat mempercepat pembangunan daerahnya salah satunya dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Besaran dari DAU sebagian besar dialokasikan pada belanja pegawai dan

selebihnya diperuntukan untuk dana pembangunan di daerah. DAU sebagai fungsi horizontal dalam rangka menekan ketimpangan pembangunan antar daerah melalui distribusi keuangan yang merata antar daerah. Kebijakan alokasi DAU berdasarkan formula yang telah ditetapkan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan dimana daerah dengan kapasitas keuangan rendah memperoleh DAU yang lebih besar. Sedangkan bagi daerah dengan kapasitas keuangan yang tinggi mendapat alokasi DAU yang lebih sedikit. Sementara, DAK diarahkan dalam membiayai kegiatan pembangunan layanan dasar yang merupakan prioritas nasional. Penggunaan DAK lebih difokuskan pada akses infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Selain DAU dan DAK, dana pembangunan juga dialokasikan melalui DBH untuk mendanai kebutuhan daerah sebagai upaya dalam mengurangi kesenjangan antara pusat dan daerah. Khan *et al.* (2017), juga menunjukkan hubungan kebijakan fiskal secara horizontal dan vertikal dapat menurunkan ketimpangan pendapatan melalui program layanan dasar.

Dana yang telah diterima mempunyai diskresi untuk dibelanjakan dalam memenuhi pembangunan layanan dasar yang sesuai dengan prioritas utama masyarakat di daerah. Ketersediaan akses seperti jalan menjadi penting untuk mempermudah mobilitas arus barang dan jasa, sehingga dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat di daerah.

Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu daerah penerima Dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan bagian dari dana transfer dari pusat ke daerah. Alokasi dana perimbangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2016-2020 cukuplah besar. Dari segi kontribusi, proporsi dana perimbangan dari pusat ke kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara rata-rata mencapai 60 persen dari total penerimaan daerah. Dengan penerimaan yang sangat besar, peran pemerintah menjadi penting dalam membelanjakan sumber

penerimaan dalam upaya mendorong pertumbuhan output lokal daerah.

Pengelolaan keuangan baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal itu sendiri. Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu indikator penting dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah (Wu *et al.*, 2010; Dudzevičiūtė *et al.*, 2017). Kesuksesan pembangunan daerah terletak pada kualitas pengelolaan belanja pemerintah yang dilakukan secara efisien, efektif transparansi dan akuntabilitas (Juanda *et al.*, 2013; Heriwibowo, 2016) serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Faridi, 2011). Instrumen fiskal seperti pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan efisiensi sektor publik seperti infrastruktur dasar, jalan, pendidikan dan kesehatan (Nazara, 2010). Pengeluaran atau alokasi belanja bidang layanan publik akan membuat pembangunan di daerah semakin maju sehingga dapat mendorong kinerja ekonomi (Feng *et al.*, 2022).

Perkembangan PDRB Perkapita kabupaten/kota Sulawesi Tenggara masih memperlihatkan pendapatan perkapita yang belum berimbang. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), rata-rata PDRB Perkapita kabupaten/kota sebesar 31.15 juta rupiah dari kurun waktu 2016-2020. Kabupaten Kolaka adalah daerah yang memiliki PDRB Perkapita tertinggi secara rata-rata, yakni sebesar 71.61 juta rupiah, sementara Kabupaten Buton merupakan daerah dengan PDRB Per kapita paling rendah dengan 17.08 juta rupiah. Selain itu, kondisi ini sangat kontras dengan kabupaten/kota lainnya, sebab PDRB Per kapita masih berada dibawah 50 juta rupiah.

Daerah-daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki PDRB Per kapita paling besar didominasi oleh daerah yang kaya sumber daya alam terutama pada sektor galian dan pertambangan. Keberadaan sektor galian dan pertambangan merupakan potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sementara daerah yang minim akan sumber daya alam tentu saja akan mendapatkan penerimaan dana transfer yang jauh lebih rendah dan hanya mengandalkan kontribusi dari sektor lain selain

sektor yang berbasis kepada sumber daya alam terutama sektor pertambangan dalam menyelenggarakan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran lebih besar dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan pendapatan melalui dana perimbangan. Peningkatan pendapatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti dengan distribusi pendapatan secara merata dapat memperparah kemiskinan dan pengangguran (Todaro & Smith, 2012).

Titik berat desentralisasi fiskal berada pada sisi pengeluaran. Penyerahan kewenangan kepada daerah yang disertai dengan dana transfer yang sebagian besar bersifat *block grant* sehingga terdapat diskresi dalam alokasi belanjanya. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pengelolaan fiskal menjadi penting dalam memastikan efisiensi belanja pemerintah.

Dalam memastikan efisiensi belanja pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan pendapatan, Variabel yang diinput dalam penelitian merupakan variabel realisasi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang jasa. Selain itu, menambahkan variabel kontrol sebagai variabel pendukung antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) dan variabel *dummy* kabupaten dan kota. Sementara variabel PDRB Perkapita digunakan Untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan kajian dari Zhang & Zou (2001) dimana indikator pendapatan perkapita merupakan indikator yang lebih mudah dipahami dalam menggambarkan keadaan ekonomi suatu wilayah.

Tujuan dari pemberian dana transfer adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan belanja pemerintah dalam mendukung program pembangunan di sektor publik seperti sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Alokasi penganggaran pembangunan yang benar-benar tepat pada keseluruhan sektor tersebut diharapkan dapat memacu pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Usaha pemerintah untuk

memperbaiki kinerja pembangunan adalah dengan menyusun berbagai program dengan pengalokasian anggaran yang proporsional untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan IPM di provinsi Sulawesi Tenggara. Namun, kondisi ini masih terdapat berbagai masalah terkait kualitas penggunaan dana dan kualitas belanja pemerintah yang belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian adalah untuk melihat pengaruh pendapatan daerah melalui belanja pemerintah terhadap PDRB Perkapita di Provinsi Sulawesi Tenggara. Ruang lingkup penelitian ini adalah desentralisasi fiskal yang dilihat dari sisi belanja pemerintah yakni belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan jasa.

METODOLOGI

Jenis dan Sumber Data

Data yang diinput merupakan data sekunder berupa realisasi belanja pegawai, realisasi belanja modal, realisasi belanja barang dan jasa, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (PDRB Per Kapita), Produk Domestik Regional Bruto Perkapita tahun sebelumnya ($PDRBprk_{(t-1)}$). Sumber data diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah data *cross-section* dalam penelitian terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota dengan periode waktu 2016 sampai 2020. Analisis data pada penelitian ini menggunakan *Software R-Studio 4.1.0*.

Analisis Deskriptif dan analisis Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi data panel. Analisis deskriptif dipakai dalam memberikan penjelasan mengenai data secara deskriptif yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Sementara, data panel merupakan salah satu

jenis data yang dapat digunakan dalam analisis model regresi panel data (*panel data regression models*), atau disebut juga dengan *pooled data* (*pooling* dari pengamatan *times series* dan *cross-section*) kombinasi dari *time series* dan *cross-section* data. Adapun persamaan model penggabungan data *cross-section* dan *times series* menggunakan 3 pendekatan yakni *Common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Persamaan model ini diadopsi dari Juanda (2009).

Common Effect Model (CEM)

CEM diasumsikan bahwa tidak ada perbedaan nilai *intersep* dan *slope* pada hasil regresi baik atas dasar perbedaan antar individu maupun antar waktu. Metode pendugaan parameter pada CEM menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} \quad \text{Untuk } i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \quad (1)$$

Jika semua asumsi klasik tentang sisaan ε_{it} dipenuhi maka kita dapat menduga model regresi secara terpisah, misalnya untuk tiap waktu t dengan melibatkan N pengamatan, modelnya untuk $t = 1$ adalah sebagai berikut:

$$Y_{i1} = a + \beta X_{i1} + \varepsilon_{i1} \quad \text{Untuk } i = 1, 2, \dots, N \quad (2)$$

Jika a dan β keduanya konstan sepanjang waktu dan juga untuk antar daerah, maka dugaan yang efisien dapat diperoleh jika semua data dikombinasikan sehingga menjadi satu model regresi dengan data besar (*pooled*) sebanyak $NT-2$ derajat bebas sisaan.

Kesulitan prosedur penggabungan ini dengan persamaan CEM adalah bahwa asumsi a dan β konstan mungkin tidak realistis. Dalam mengatasi masalah tersebut maka dilakukan di dalam beberapa pendekatan lain seperti FEM REM (Juanda, 2009; Juanda dan Junaidi 2012).

Fixed Effect Model (FEM)

Jika hanya *intersep* a yang berubah sepanjang waktu dan berbeda antar daerah, maka dapat diatasi dengan memasukkan peubah *dummy* untuk memungkinkan perbedaan *intersep* a . Adapun bentuk persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = a + \beta X_{it} + \gamma_2 W_{2t} + \gamma_3 W_{3t} + \dots + \gamma_N W_{Nt} + \delta_2 Z_{i2} + \delta_3 Z_{i3} + \dots + \delta_T Z_{iT} + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Dimana:

$$W_{it} = \begin{cases} 1 & \text{untuk individu daerah ke } -i; i = 2, 3, \dots, N \\ 0 & \end{cases}$$

$$Z_{it} = \begin{cases} 1 & \text{untuk periode waktu ke } -t; t = 2, 3, \dots, T \\ 0 & \end{cases}$$

Persamaan (3) di atas, sebenarnya merupakan model regresi peubah *dummy* dengan menambah $(N+T-2)$ peubah bebas *dummy*. Koefisien *dummy* mengukur perbedaan *intersep* antar daerah I dengan daerah pertama ($i = 1$), dan perubahan *intersep* antara waktu t dengan waktu pertama ($t = 1$). Untuk menguji apakah *intersep* a konstan pada tiap daerah i dan tiap waktu t , maka digunakan statistik uji berikut yang menyebar menurut sebaran F dengan $(db1=N+T-2)$ dan $(db2=NT-N-T)$.

$$F_{N+T-2, NT-N-T} = \frac{(JKS_1 - JKs_2)/(N+T-2)}{(JKs_2)/(NT-N-T)} \quad (4)$$

JKS_1 (Jumlah kuadrat sisa dalam ANOVA) hasil model OLS dan JKs_2 hasil model efek tetap. Jika nilai $-p < a$ ($F_{hit} > F_{a(db,db2)}$) maka terbukti bahwa asumsi (restriksi) semua *intersep* konstan tidak benar.

Random Effect Model (REM)

Pendekatan dengan menggunakan REM mengasumsikan data panel yang mempunyai karakteristik komponen sisanya berkorelasi antar waktu dan antar individu daerah. persamaan komponen sisaan (*error*) ini disebut juga REM, misalnya dengan persamaan berikut;

$$Y_{it} = a + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} \quad (5)$$

$$\varepsilon_{it} = U_i + V_t + W_{it}, \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, N; t = 1, 2, \dots, T \quad (6)$$

Dimana:

$U_i \sim N(0, \sigma_u^2)$: Komponen sisaan data *cross-section*

$V_t \sim N(0, \sigma_v^2)$: Komponen sisaan data *time series*

$W_{it} \sim N(0, \sigma_w^2)$: Komponen sisaan gabungan

Hubungan antara *error-components model* dan *covariance model* dapat dilihat dengan memperlakukan komponen-komponen *intersep* dalam *covariance model* sebagai dua peubah acak, satu peubah deret waktu dan satu peubah *cross-section*. Ketika kedua peubah acak menyebar secara normal, derajat bebas sisaan dapat dihemat sehingga dapat memperhatikan rataan dan ragam dari komponen sisaan.

Dalam menentukan model terbaik, tahapan pengujian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Uji Chow*, membandingkan CEM dan FEM. Hipotesis statistik yang dihasilkan adalah jika $H_0 = CEM > 0.05$, $H_1 = FEM < 0.05$
2. *Uji Hausman*, membandingkan REM dan FEM, jika $H_0 = REM > 0.05$, $H_1 = FEM < 0.05$.
3. *Uji Lagrange Multiplier*, membandingkan CEM dan REM. $H_0 = CEM > 0.05$, $H_1 = REM < 0.05$

Tahapan selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik. Adapun model yang terpilih harus memenuhi persyaratan dalam pengujian uji asumsi klasik yakni:

1. Uji Normalitas digunakan untuk melihat pergerakan atau sebaran data.
2. Uji Multikolinearitas digunakan untuk memastikan tidak adanya korelasi yang kuat antar sesama variabel
3. Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat ketidaksamaan varian dari residual

untuk semua pengamatan pada perhitungan model regresi

4. Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui hubungan variabel yang ada dalam model dugaan dengan perubahan waktu.

Penggunaan uji asumsi klasik tidak menjadi syarat mutlak dalam perhitungan. Hal itu tergantung pada pilihan model yang terpilih. Sebab, persamaan CEM, FEM dan REM mempunyai syarat tersendiri dalam memenuhi pengujian asumsi klasik.

Semua variabel dalam penelitian sudah dilakukan standarisasi data dengan membagi tiap variabel dengan jumlah penduduk. Jumlah penggunaan *dummy* dalam penelitian ini adalah satu, dimana *dummy* kota sama dengan (0) sedangkan untuk *dummy* kabupaten sama dengan (1)

Konstruksi pemodelan ekonometrika dapat dilihat pada model dibawah ini.

$$\begin{aligned} \text{LnPDRBprk}_{it} = & a_0 + a_1 \text{PDRBprk}_{(t-1)it} \\ & + a_2 \text{LnBpgi}_{it} + a_3 \text{LnBmdl}_{it} \\ & + a_4 \text{LnBbrj}_{it} + a_5 \text{LnIPM}_{it} \\ & + a_6 \text{LnBpgi} * \text{Kab}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Keterangan:

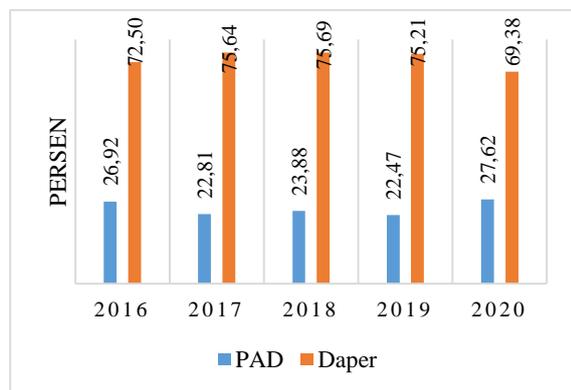
PDRBprk	: Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (rupiah/kapita)
PDRBprk _(t-1)	: Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita tahun sebelumnya (rupiah/kapita)
Bpgi	: Realisasi Belanja Pegawai (rupiah/kapita)
Bmdl	: Realisasi Belanja Modal (rupiah/kapita)
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
Bpgi*Kab	: Dummy Realisasi Belanja Modal (rupiah/kapita)
Ln	: <i>Logaritma Natural</i>
a ₀	: Konstanta
a _{1,....a₆}	: Koefisien variabel <i>independen</i>
i	: Kabupaten/Kota
t	: Tahun
ε	: <i>Error</i>

Dalam mengestimasi hasil pemodelan regresi, pendekatan dilakukan dengan menggunakan CEM, FEM, dan REM. Hasil dari pemodelan tersebut dilakukan pengujian untuk mengidentifikasi pemilihan model terbaik

dengan menggunakan *Uji Chow* dan *Uji Hausman*. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan belanja pemerintah dan faktor lainnya dianalisis secara deskriptif berdasarkan kesimpulan pada hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

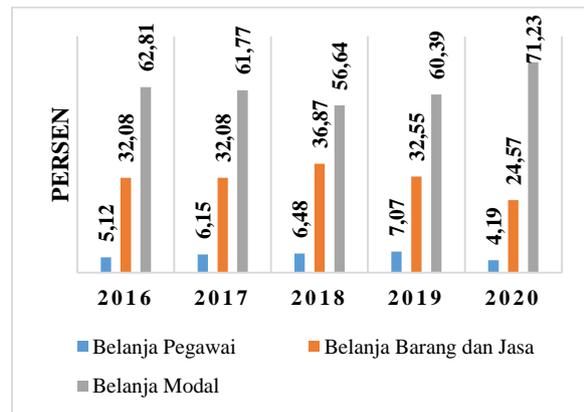
Provinsi Sulawesi Tenggara mencakup wilayah daratan dan lautan yang terdiri dari 15 kabupaten dan 2 kota. Dalam mendorong peningkatan pendapatan dan tetap menjaga pemerataan pendapatan antar daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan ke daerah sesuai dengan kapasitas keuangan tiap daerah dalam mempercepat peningkatan pembangunan terutama daerah dengan pendapatan perkapita yang rendah. Perkembangan Dana Perimbangan di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 2016-2020 selalu mengalami peningkatan.



Gambar 1. Perbandingan distribusi Dana perimbangan Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: BPS, 2020 (data diolah)

Berdasarkan Gambar 1, kontribusi PAD terhadap total pendapatan bergerak secara fluktuatif dari tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 kontribusi PAD hanya mencapai 27.62% terhadap total pendapatan daerah. Sedangkan kontribusi dari dana perimbangan mencapai 72%. Berdasarkan hal tersebut, kontribusi dana perimbangan masih cukup dominan dalam proses pembangunan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Besaran dana perimbangan menunjukkan bahwa provinsi Sulawesi Tenggara masih memiliki ketergantungan yang masih

besar kepada pemerintah pusat. Keterlibatan peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan sangat penting untuk menjadikan daerah lebih mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada. Disisi lain menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak dan retribusi daerah. Penerimaan daerah yang dialokasikan untuk pembangunan, mesti dibelanjakan secara efektif dan tepat sasaran sebagai tujuan dari pemerataan pembangunan yang difokuskan pada pelayanan dasar untuk mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat. Jika dilihat dari perkembangan belanja pemerintah dari tahun 2016-2020, alokasi belanja modal termasuk penyumbang kontribusi terbesar dibandingkan dengan belanja pemerintah lainnya.



Gambar 2. Perbandingan proporsi belanja terhadap total belanja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
Sumber: BPS, 2020 (data diolah)

Pada tahun 2020 kontribusi belanja modal terhadap total belanja langsung mencapai 71.23% sedangkan kontribusi belanja barang jasa hanya 24.57% serta kontribusi belanja pegawai paling rendah yakni sebesar 4.19% terhadap total belanja pada tahun 2020.

Perbandingan Distribusi Dana Perimbangan, PAD dan Jumlah Populasi Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara Tahun 2020

Proses distribusi Dana Transfer menurut UU No 33 tahun 2004, besaran alokasi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, jumlah populasi serta luas wilayah pada

suatu daerah. Dana transfer yang dikucurkan mempunyai fungsi masing-masing dalam mempercepat pembangunan di Daerah. Dimana

dana transfer yang dialokasikan ke daerah meliputi DAU, DAK dan DBH.

Tabel 1. Perbandingan Distribusi Dana Perimbangan, PAD dan Populasi Kabupaten/Kota Sulawesi Tenggara tahun 2020

Kabupaten/Kota	Total Daper (Juta Rp)	Pangsa (%)	Total PAD (Juta Rp)	Pangsa (%)	Populasi (Jiwa)	Pangsa (%)
Bau-Bau	578,268.97	5.25	112,000.00	8.11	176,224	6.40
Bombana	748,766.37	6.80	69,314.22	5.02	189,269	6.87
Buton	509,716.55	4.63	26,990.00	1.95	103,869	3.77
Buton Selatan	472,089.25	4.28	12,803.13	0.93	81,752	2.97
Buton Tengah	468,501.76	4.25	18,014.57	1.30	94,207	3.42
Buton Utara	456,244.30	4.14	20,623.45	1.49	64,993	2.36
Kendari	871,013.52	7.90	476,628.29	34.52	404,232	14.67
Kolaka	877,457.01	7.96	180,643.52	13.08	266,069	9.66
Kolaka Timur	537,503.61	4.88	22,205.00	1.61	135,569	4.92
Kolaka Utara	622,734.98	5.65	45,948.30	3.33	153,669	5.58
Konawe	775,406.13	7.04	118,765.18	8.60	260,411	9.45
Konawe Kepulauan	402,615.82	3.65	10,660.30	0.77	34,666	1.26
Konawe Selatan	973,166.79	8.83	66,194.96	4.79	319,291	11.59
Konawe Utara	661,548.67	6.00	66,592.95	4.82	65,183	2.37
Muna	895,965.69	8.13	78,333.00	5.67	227,289	8.25
Muna Barat	494,171.31	4.48	19,296.43	1.40	82,785	3.00
Wakatobi	673,824.02	6.12	35,580.06	2.58	96,111	3.49
Total	11,018,994.75	100	1,380,593.37	100	2,755,589	100

Sumber: DJB Kemenkeu 2020, data diolah

Pada Tabel 1, distribusi dana transfer dialokasikan berdasarkan dengan pendapatan asli daerah pada tahun 2020. Dimana total Dana transfer secara keseluruhan dari kabupaten/kota adalah sebesar 11,018,994.75 Ribu Rupiah. Sedangkan total jumlah PAD sebesar 1,380,593.37 Ribu Rupiah dengan jumlah penduduk provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebanyak 2,755,589 Jiwa. Dari total dana transfer, kabupaten Konawe Selatan adalah daerah yang memiliki distribusi Dana Transfer paling besar terhadap semua kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara yakni dengan kontribusi 8.83%. Dengan Jumlah PAD sebesar Rp 66,194.96 Ribu. Disisi lain jumlah penduduk Konawe selatan juga merupakan jumlah penduduk terbesar Kedua setelah Kota Kendari yakni sebanyak 319,291 Jiwa. Berdasarkan nilai dari dana transfer dari pusat ke daerah. Distribusi dana transfer berdasarkan kapasitas kemampuan keuangan dan jumlah penduduk di

daerah. Hal itu dapat terlihat pada Tabel 1, daerah-daerah yang memiliki PAD lebih tinggi diberikan dana transfer tidak lebih besar dengan kemampuan keuangan daerah dengan mempertimbangkan Jumlah populasi di daerah sebagai ukuran perhitungan dalam pengalokasian dana transfer.

Kota Bau-Bau, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe memiliki PAD yang lebih besar sehingga dana transfer yang dialokasikan lebih kecil dari kemampuan keuangan daerah. Sedangkan untuk Kabupaten yang memiliki kemampuan keuangan rendah diberikan dana transfer lebih besar dari kemampuan keuangan daerah seperti Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Muna,

Kabupaten Muna Barat, dan Kabupaten Wakatobi.

Kabupaten yang memiliki PAD paling rendah yaitu Kabupaten Konawe Kepulauan dengan kontribusi 0.77% dari total PAD Secara keseluruhan sedangkan kemampuan daerah dengan PAD yang paling tinggi adalah Kota Kendari dengan kontribusi 34.52% dari total kabupaten/kota. Namun, dari segi kontribusi tiap kabupaten/kota, alokasi dana transfer dengan kapasitas fiskal tinggi masih memperlihatkan porsi penerimaan yang cukup besar.

Pola distribusi DAU di masing-masing daerah diperuntukan untuk menekan celah fiskal antara daerah kaya tidak semakin jauh dengan daerah miskin. Sedangkan alokasi DAK diperuntukan untuk kebutuhan khusus melalui peningkatan pelayanan dasar publik. Dengan pemerataan kemampuan keuangan daerah diharapkan dapat mendorong belanja pemerintah dalam peningkatan pelayanan dasar publik dan infrastruktur. Peningkatan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dalam melakukan kegiatan ekonomi serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di daerah.

Haryanto (2016) menjelaskan bahwa dana transfer bertujuan untuk memberikan keseimbangan fiskal bagi daerah dalam menciptakan pemerataan. Salah satunya dapat diwujudkan untuk mendorong belanja pemerintah dalam meningkatkan pembangunan di daerah.

Pengaruh Belanja Pegawai, Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, IPM dan pendapatan perkapita tahun sebelumnya terhadap Pendapatan Perkapita

Alat analisis yang dipakai untuk mengetahui faktor-faktor belanja pemerintah dan variabelnya lainnya dalam perhitungan adalah dengan menggunakan analisis regresi data panel. Dalam membangun model persamaan ekonometrika, tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengujian model yang telah di estimasi yakni CEM, FEM dan REM Model yang telah diestimasi kemudian dilakukan pengujian untuk memilih model yang terbaik dari tiga model yang ada. Pengujian model dilakukan dengan dua tahapan yakni uji chow dan uji hausman. Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Perbandingan Uji Chow dan Uji Hausman

	F/Chisq	df	Probab
Uji Chow	2.4214	16	0.006
Uji Hausman	14.227	7	2.382

Sumber: Data olahan dari output R-Studio 4.1.0.

Berdasarkan hasil uji chow didapat nilai *Probabilitas F-statistik* sama dengan 0.000, dimana *Probabilitas F-statistik* < α (0.05) yang berarti hipotesis menolak H_0 . Dengan demikian, hasil regresi dengan menggunakan FEM lebih tepat dibandingkan dengan CEM. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan pengujian kedua yaitu dengan uji Hausman. Sementara, Uji Hausman membandingkan antara FEM dan REM. Dimana hipotesis statistik yang dihasilkan adalah jika $H_0 = \text{REM}$ dan $H_1 = \text{FEM}$. Dari hasil pengujian ditemukan dengan nilai *Probabilitas F-statistik* > α (0.05) sehingga gagal tolak H_0 . Berdasarkan uji ini didapat bahwa model REM lebih baik dibandingkan dengan FEM.

- b. Pengujian asumsi klasik

Dalam memastikan tidak adanya korelasi yang kuat antar sesama variabel, maka dilakukan pengujian Multikolinearitas.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas antar variabel

Variabel	VIF
LnPDRBprk _(t-1)	2.48722
LnBpgi	2.01664
LnBbrj	2.94169
LnBmdl	2.82156
LnIPM	6.68294
LnBpgi*Kab	3.46788

Sumber: Data olahan dari output R-Studio 4.1.0.

Berdasarkan pengujian multikolinearitas tidak ditemukan keterkaitan yang kuat antar

sesama variabel bebas. Hal itu ditunjukkan dengan nilai VIF berada di bawah 10.

Dalam persamaan REM, pengujian asumsi klasik lainnya seperti adanya masalah heteroskedastisitas dan masalah autokorelasi sudah dikoreksi dalam perhitungan. Olehnya itu,

model dengan menggunakan REM sebagai pilihan model terbaik dalam mengestimasi pengaruh belanja pemerintah terhadap PDRB Perkapita. Adapun hasil persamaan regresi dengan menggunakan FEM adalah dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pengaruh belanja pegawai, belanja modal dan belanja dan jasa serta variabel lainnya terhadap pendapatan perkapita

VARIABEL	Koefisien Parameter				
	Koefisien		Std.error	t-value	Probab
Intersep	-0.008		0.746	-0.011	0.991
LnPDRBprk _(t-1)	0.904 ***		0.023	39.643	0.000
LnBpgi	-0.067 ***		0.028	-2.450	0.014
LnBbrj	0.028 **		0.016	1.764	0.078
LnBmdl	0.029 **		0.016	1.833	0.067
LnIPM	0.434 ***		0.203	2.136	0.033
LnBpgi*Kab	0.002		0.002	0.900	0.368
R-Square	0.982				
F-Stat	4216.540				
Prob F-Stat	0.000				

Sumber: Data olahan dari output R-Studio 4.1.0.

Ket: ***: Signifikan 1%, **: Signifikan 5%, *signifikan 10%

Dari hasil persamaan diatas dapat dilihat bahwasanya *R-square* memiliki nilai sebesar 0.9820 (98.20%). Hal ini memperlihatkan bahwasanya bahwa model dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 98.20% oleh variabel independen dan sisanya 1.80% dapat dijelaskan variabel lain diluar model.

Dari persamaan model ini dapat dilihat bahwasanya semua variabel mempunyai pengaruh terhadap PDRB Perkapita. Hasil regresi menunjukkan variabel yang berpengaruh signifikan negatif adalah variabel belanja pegawai baik kabupaten maupun wilayah kota. Namun, jika dilihat dari nilai koefisiennya wilayah kabupaten tidak lebih besar daripada wilayah kota yakni sebesar -0.067. pada variabel dummy kabupaten untuk belanja pegawai menunjukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap PDRB Perkapita. Hal ini mirip dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Hutarian (2019) menunjukkan bahwa alokasi belanja pegawai tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Variabel yang lain menunjukan hasil yang berbeda, dimana variabel yang memiliki pengaruh signifikan positif adalah belanja barang jasa, belanja modal, dan IPM. Nilai

koefisien realisasi belanja barang dan jasa berpengaruh positif terhadap PDRB Perkapita sebesar 0.028. Artinya setiap peningkatan 1 % Belanja barang dan jasa bisa meningkatkan pertumbuhan PDRB perkapita Sebesar 0.028 % [Tabel 4]. Hasil penelitian serupa dengan temuan (Napitupulu, 2017) bahwa belanja barang dan jasa berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana alokasi belanja barang dan jasa mampu mendorong PDRB perkapita di daerahnya.

Nilai koefisien realisasi belanja modal (LnBmdl) berpengaruh positif terhadap PDRB Perkapita baik wilayah kabupaten maupun wilayah perkotaan yakni sebesar 0.029. Artinya setiap peningkatan 1% belanja Modal bisa meningkatkan PDRB Perkapita Sebesar 23%. Hal ini mirip yang dilakukan Puput Waryanto (2017) bahwasanya Pengeluaran pemerintah seperti belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Juanda, (2019) mengatakan bahwa semakin berkualitas belanja yang dilakukan pemerintah daerah akan semakin meningkatkan PDRB Perkapita.

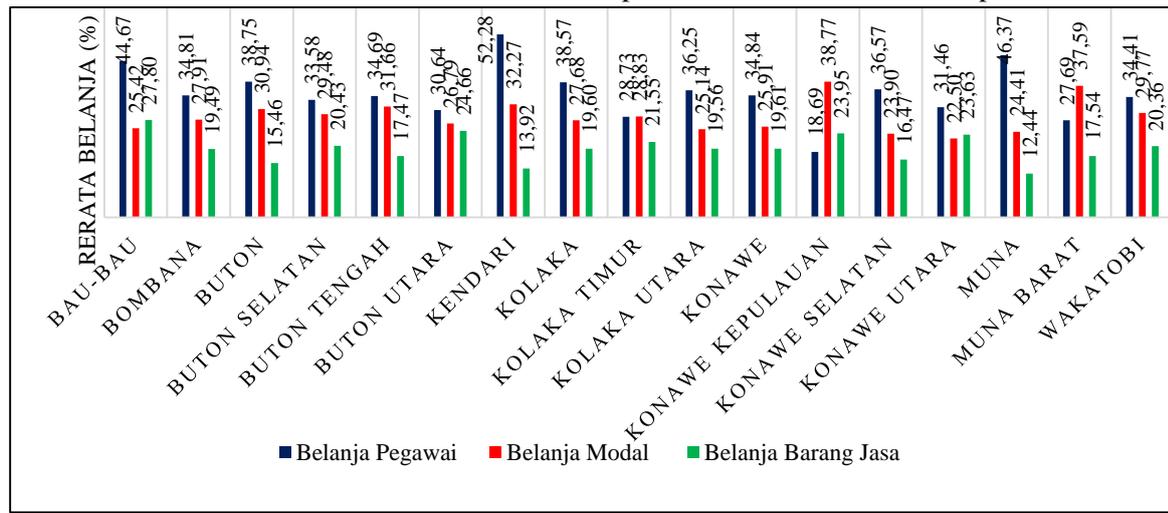
Hal ini diungkapkan juga oleh Juanda *et al.* (2017), dimana daerah dengan sumber daya tinggi memiliki investasi jauh lebih besar

daripada pengeluaran pemerintah dalam menentukan pertumbuhan ekonomi.

Nilai koefisien Indeks Pembangunan Manusia (LnIPM) berpengaruh negatif terhadap PDRB Perkapita sebesar 0.434, artinya setiap peningkatan 1% IPM dapat meningkatkan PDRB Perkapita Sebesar 0.434. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Expenditure & Growth, 2020; Ezkirianto & Alexandi, 2018; Iskandar, 2017) bahwasanya

IPM dapat berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB perkapita.

Dari semua kabupaten/kota alokasi belanja yang paling mendominasi terhadap total anggaran belanja adalah belanja pegawai paling besar. Sedangkan untuk belanja modal dan belanja barang jasa lebih besar berada pada wilayah kabupaten. Alokasi belanja modal kabupaten relatif besar dibandingkan dengan persentase alokasi anggaran belanja modal di perkotaan. Hal ini bisa dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Perbandingan besaran alokasi belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang serta jasa yang diperlihatkan dengan nilai rata-rata belanja terhadap total belanja

Besaran nilai rata-rata alokasi belanja pegawai menunjukkan Kota Kendari merupakan persentase terbesar dari semua kabupaten/kota, diikuti kabupaten Muna terbesar kedua dengan nilai rata-rata sebesar 46.37% dari total belanja, selanjutnya Kota Bau-Bau yang merupakan terbesar ketiga dengan rata-rata alokasi belanja pegawai sebesar 44.67%. Sedangkan kabupaten Konawe Kepulauan adalah daerah dengan alokasi belanja pegawai paling kecil dengan nilai rata-rata belanja pegawai sebesar 18.69%. anggaran belanja pegawai untuk Kota Kendari dan Kota Bau-Bau cukup besar yakni sebesar 52.28% dan 44.67% terhadap total anggaran belanja pemerintah. Sementara untuk rata-rata alokasi belanja modal paling besar adalah Kabupaten Konawe Kepulauan sebesar 38.77% dan menyusul kabupaten Muna Barat terbesar kedua yakni sebesar 37.59%. Kedua kabupaten tersebut merupakan kabupaten yang alokasi belanja modalnya lebih besar dibandingkan

dengan belanja pegawai dan belanja barang jasa. Sedangkan alokasi belanja modal terbesar ketiga ditempati Kota Kendari sebesar 32.27%. Disisi lain untuk persentase alokasi anggaran belanja barang jasa paling tinggi adalah Kota Bau-Bau yakni sebesar 27.80% sedangkan untuk Kabupaten Muna merupakan persentase paling kecil dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yakni hanya mencapai 12.44% anggaran belanja barang jasa. Dimana belanja modal dialokasikan sebagai instrumen dalam membiayai kebutuhan pelayanan dasar seperti infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan dan kesehatan. Dengan adanya fasilitas pelayanan tersebut diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya dan memperlancar jalur distribusi barang dan jasa sehingga dapat menumbuhkan kegiatan ekonomi antara masyarakat.

KESIMPULAN

Kemajuan ekonomi kabupaten/kota Sulawesi Tenggara dapat dilihat dari pendapatan perkapitanya. Dari hasil perhitungan faktor-faktor belanja pemerintah seperti belanja barang dan jasa, serta belanja modal pada daerah kabupaten menunjukkan pengaruh signifikan positif terhadap PDRB Perkapita. Berbeda dengan belanja pegawai yang menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap PDRB Perkapita. Alokasi belanja pegawai belum sepenuhnya memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini serupa dengan perubahan formula perhitungan DAU, terkait belanja pegawai yang tertuang pada UU No 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu terdapat peran investasi di daerah yang digambarkan dengan pembentukan modal tetap bruto menunjukkan pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan PDRB Perkapita di wilayah kabupaten maupun perkotaan. Variabel IPM juga menunjukkan pengaruh cukup besar dalam mendorong output perkapita daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baltagi, B. H. (2005). *Econometrics Analysis of Panel Data*. England (GB): John Wiley and Sons.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Daerah Sulawesi Tenggara*. Sulawesi Tenggara (ID): BPS Daerah Sulawesi Tenggara.
- Deswanto, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187.
- Dudzevičiūtė, G., Šimelytė, A., & Antanavičienė, J. (2017). Causal nexus between export and economic growth in the European Union countries. *Montenegrin Journal of Economics*, 13(2), 107–120.
- Expenditure, C., & Growth, E. (2020). The Impact of Economic Growth and Human Development Index on Poverty in Riau Province. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 2(02).
- Ezkirianto, R., & Alexandi, M. F. (2018). Analisis Keterkaitan Antara Indeks Pembangunan Manusia Dan Pdrb Per Kapita Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 2(1), 14–29.
- Faridi, M. Z. (2011). *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan*. 31(1), 1–13.
- Feng, H., Liu, Z., Wu, J., Iqbal, W., Ahmad, W., & Marie, M. (2022). Nexus between Government spending's and Green Economic performance: Role of green finance and structure effect. *Environmental Technology & Innovation*, 27, 102461.
<https://doi.org/10.1016/j.eti.2022.102461>
- Hajamini, M., & Falahi, M. A. (2014). The nonlinear impact of government consumption expenditure on economic growth: Evidence from low and low-middle income countries. *Cogent Economics and Finance*, 2(1).
- Haryanto JT. 2016. *Kebijakan Strategis Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2016* [Internet]. [diunduh 2017 Maret 25]. Tersedia pada <http://www.kemenkeu.go.id/media4420/kebijakan-strategis-tkd-dan-dd-2016.pdf>
- Hidayat, I., Mulatsih, S., & Rindayati, W. (2020). The Determinants of Inclusive Economic Growth in Yogyakarta. *Jurnal Economia*, 16(2), 200–210.
- Iskandar, I. (2017). Effect Of Human Development Index Fund on Economic Growth Through A Special Autonomy. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 18(1), 50.
- Juanda B, Suratman E, Handra H. (2017). The fiscal transfer effect on regional inequality. *Seminar on The 6th IRSA International Institute*, Manado: IRSA Institute.
- Juanda B. 2016. Reformasi Kebijakan Desentralisasi Fiskal Upaya Mendorong Pertumbuhan dan Mengurangi Kesenjangan Antardaerah. *Radar Banten*. Rubrik Opini: 2 (Kol 1-4),
- Juanda, B., Heriwibowo, D. (2016). Konsolidasi Desentralisasi Fiskal Melalui Reformasi Kebijakan Belanja Daerah Berkualitas. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 7, No. 1 Juni 2016, Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi, DPR RI.

- Juanda B, Junaidi. (2012). *Ekonometrika Deret Waktu*. Bogor: IPB Press
- Juanda, B. (2019). *Apbn berkualitas I*. 1–40.
- Khan, Q., Faguet, J. P., & Ambel, A. (2017). Blending Top-Down Federalism with Bottom-Up Engagement to Reduce Inequality in Ethiopia. *World Development*, 96, 326–342.
- Lewaherilla dan, E., & Hendra Tanate Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D. (2020). Determinasi pendapatan perkapita sebagai Jalan keluar dari middle income trap. *Esy Lewaherilla Dan Devrin Hendra Tanate*, 3(1), 13–21.
- Limoeiro, D. (2015). Beyond income transfers: The decline of regional inequality in Brazil during the 2000s. *Progress in Development Studies*, 15(1), 6–21.
- Musgrave, R. (1959). *The Theory of Public Finance*. N.Y. McGraw-Hill
- Napitupulu. (2017). UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91.
- Nazara S. (2010). *Pemerataan Antar Daerah Sebagai Tantangan Utama Transformasi Struktural Pembangunan Ekonomi Indonesia Masa Depan*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Bidang Ilmu Ekonomi. Universitas Indonesia.
- Noviyanti, D. (2021). Determinan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pengembangan Jawa Barat Tahun 2014-2018 dengan Pendekatan Regresi Panel Spasial. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2021(1), 878–888.
- Oates, W. E (1993). Fiscal Decentralization and Economic development. *National Tax Journal*, 26 (2): 237-243.
- Todaro MP, Smith SC. (2012). *Economic Development*. Edisi II. Boston (UK): Pearson Education Inc
- [UU] Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. 2004
- [UU] Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah. 2022
- [UU] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Wahyuni, S., Juanda, B., & Fahmi, I. (2018). Kualitas Belanja Daerah Dan Hubungannya Dengan Kinerja Pembangunan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2), 16–31.
- Wallich, C., & Bird, R. (1993). Fiscal decentralization and intergovernmental relations in transition economics: toward a systematic framework of analysis. *The World Bank, Policy Research Working Paper Series: 1122, 1993*.
- Wardhana, A., Juanda, B., Siregar, H., & Wibowo, K. (2013). Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 15(2), 111.
- Zhang, T., Zou, H. H. (2001) The Growth Impact of Intersectoral and Intergovernmental Allocation of Public Expenditure: with applications to China and India. *China Economic Review*, 2: 58-81.